

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**RENCANA KERJA
SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH
(RENJA SKPD)**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang merupakan hasil kesepakatan seluruh stakeholder. RKPD disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik dimana harus ada keseimbangan antara perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, bottom-up serta top-down.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2018 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang administrasi pemerintahan serta penyusunan kebijakan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2018. Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan

proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja dan review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan dan Penerapan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

b. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);

3. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;
4. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Bagian –Bagian pada Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
6. Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2018

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.2 Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 telah dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dan kemudian menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi.

Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar SKPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

a. Kondisi Organisasi dan Aparatur.

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi.

Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar SKPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

b. Kondisi Sosial dan Budaya

Tergradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus

dalam pelaksanaannya.

Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung tanpa adanya peran aktif pemerintah dalam mengatasinya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Lunturnya nilai-nilai adat, budaya dan agama akan berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun terhadap lingkungan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2016 masih ditemui kendala-kendala, sehingga beberapa program dan kegiatan belum berjalan optimal sebagaimana yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang masih belum optimal pelaksanaannya diantaranya terlihat pada masih rendahnya serapan dana yang telah dialokasikan untuk program atau kegiatan dimaksud. Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- a. Pengadaan Tanah, Ganti Rugi Bangunan dan Ganti Tanaman untuk Pembangunan.

Permasalahan :

- Instansi/SKPD yang membutuhkan pengadaan tanah/pembebasan tanah guna pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi/SKPD tersebut kurang aktif untuk menyiapkan dokumen-dokumen pembebasan tanah, seperti dokumen perencanaan pengadaan tanah, kesesuaian dengan RTRW, kesesuaian dengan Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan RPJM Daerah, dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan dan studi kelayakan rencana pembangunan yang dilaksanakan, sehingga permasalahan tersebut memperlambat kelancaran proses pembebasan tanah dimaksud.

- Penetapan lokasi pembangunan oleh Gubernur Sumatera Barat, baik terhadap pengadaan tanah skala kecil (dibawah 1 Ha) maupun pengadaan tanah di atas 1 Ha, membutuhkan waktu yang cukup lama sampai diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang penetapan lokasi pembangunan dimaksud.
- Keterlambatan instansi/SKPD memberitahukan atau melaporkan kegiatan pembangunannya yang membutuhkan pembebasan tanah, sehingga pada saat pihak pelaksana (rekanan) akan melaksanakan pekerjaannya (kadang juga sudah menumpuk material proyek pembangunan), sementara lahan/tanah tersebut belum dibebaskan.
- Persoalan harga ganti kerugian tanah yang diminta oleh masyarakat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan penghitungan nilai harga tanah yang dilakukan oleh Tim Penilai Publik (Apraisal), dimana masyarakat meminta harga ganti rugi di atas dari nilai yang ditetapkan oleh Apraisal dimaksud. Sedangkan Apraisal merupakan dasar untuk pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (apabila harga NJOP dan harga berdasarkan transaksi jual beli tidak terjadi kesepakatan dengan pemilik tanah).
- Kurangnya sosialisasi awal yang dilaksanakan oleh SKPD/Instansi yang akan melaksanakan pembangunan tersebut kepada masyarakat pemilik tanah dan masyarakat terkena dampak dan tidak didukung dengan surat pernyataan kesepakatan/berita acara kesepakatan tentang rencana pembangunan dimaksud.
- Kegiatan pengadaan tanah tidak hanya melibatkan Bagian Pemerintahan Umum, tetapi juga SKPD/Instansi yang membutuhkan tanah dan terutama sekali adalah BPN. BPN selaku lembaga pertanahan mengalami keterbatasan-keterbatasan, seperti jumlah pegawai (staf ukur dan staf administrasi) maupun kesibukan melaksanakan kegiatan rutin

instansinya. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

- Permasalahan tanah ulayat yang terkena kegiatan pembebasan tanah, karena adanya konflik internal atau permasalahan dalam kaum tersebut sehingga memperlambat proses pembebasan tanah dimaksud.

2. Program Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan

a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan

Permasalahan :

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

- Tanah-tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sejak dahulunya tidak dimanfaatkan dengan segera, sehingga tanah tersebut menjadi tanah terlantar dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menggarap dan menghuni tanah dimaksud.
- Bukti Administrasi kepemilikan tanah tersebut, baik berupa sertifikat ataupun surat tanah tidak ada serta keadaan fisik di lapangan yang tidak tegas dan jelas.
- Tidak adanya informasi tentang penguasaan fisik tanah tersebut dan larangan untuk menggarap/memanfaatkan tanah tersebut, seperti melalui papan informasi dan sejenisnya.
- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang disebabkan oleh tuntutan faktor ekonomi, sehingga dalam melaksanakan aktivitas ekonomi tersebut memakai daerah badan jalan, memanfaatkan tanah negara dengan mendirikan bangunan dan menanam tanaman secara liar dan illegal.

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a. Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Pessel

Permasalahan:

- Sulit mengidentifikasi ajaran-ajaran Aliran Kepercayaan masyarakat.
- Belum adanya mekanisme yang baku tentang proses pengawasan dan pelarangan aliran kepercayaan yang diduga sesat.

b. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Permasalahan:

- Sulitnya memetakan potensi konflik secara rinci masing-masing Kecamatan disebabkan karena kondisi masyarakat yang dinamis.
- Sulitnya memantau potensi konflik dimasing-masing Kecamatan.
- Terbatasnya sarana mobilitas.

4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

a. Komunitas Intelijen Daerah

Permasalahan:

- Masing-masing unsur memiliki keterbatasan waktu untuk rapat koordinasi sehingga koordinasi formal (rapat) lebih sedikit tetapi koordinasi non formal yang lebih menonjol.
- Sumber daya manusia yang ada belum memiliki keahlian Intelijen atau belum ada yang ikut Diklat Intelijen.
- Latar pendidikan staf di bidang politik belum ada.

b. Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Permasalahan:

- Banyaknya tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan untuk diselesaikan oleh Kesbangpol sementara kegiatan yang tersedia tidak mampu menampungnya.

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**a. Kegiatan Forum Kewaspadaan dini masyarakat****Permasalahan:**

- Berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2006, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/desa. Pada saat ini yang telah dibentuk baru ditingkat Kabupaten sehingga informasi tentang gangguan keamanan dan bencana alam belum terhimpun secara merata.
- Belum adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang Sosiologi.

6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**a. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika****Permasalahan:**

- Banyaknya target sasaran yang harus diberikan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sementara anggaran yang ada tidak memadai untuk dilakukannya Sosialisasi.
- Belum adanya Puskesmas yang menjadi Instansi Penerima Wajib Laport di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Belum adanya panti rehabilitasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Program Pendidikan Politik masyarakat**a. Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM sesuai UU Keormasan****Permasalahan:**

- Banyaknya pendirian Ormas/LSM yang tidak memberi pemberitahuan ke Kesbangpol.
- Perubahan data Kepengurusan Ormas/LSM yang ada tidak di update.

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan daerah.

Permasalahan :

- Laporan yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan untuk membuat lapor bulanan yang terkini sebagai bahan evaluasi pekerjaan.

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Permasalahan :

- Belum adanya tersedia sistem aplikasi yang dapat menyimpan data – data kepegawaian serta arsip – arsip kepegawaian secara on line / komputerisasi.

10. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda

- a. Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barangdan Jasa

Permasalahan :

- Pokja Pengadaan Barang dan Jasa masih bersifat Adhoc, sehingga proses pengadaan barang dan jasa kurang fokus, karena anggota pokja masih dibebani dengan tanggung jawab di instansi asal mereka.

11. Program Pemantapan Otonomi Daerah

- a. Kegiatan Penyusunan LPPD

Permasalahan :

- Kurangnya perhatian dari Kepala SKPD dalam penyampaian data, sehingga data yang disampaikan oleh SKPD tidak valid, ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data pendukung yang diberikan.

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam penunjang terlaksananya Kegiatan Penyusunan LPPD
- Kurangnya petunjuk teknis dalam penyusunan LPPD

12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (Raskin)

Permasalahan :

- Idealnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada penerima manfaat, dapat dilakukan saat Raskin didistribusikan oleh Perum Bulog ke Titik Distribusi (Nagari) yang ada di kecamatan. Namun karena keterbatasan waktu, personil dan anggaran yang tersedia, hal tersebut belum dapat sepenuhnya dilakukan, dan hanya bersifat isidentil pada kecamatan atau nagari yang berpotensi mengalami permasalahan.
- Disamping itu di Kabupaten Pesisir Selatan Raskin yang diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan ketentuan yaitu 15 kg per RTS-PM, juga tidak dapat terlaksana, dan pada umumnya kurang dari 15 kg, karena ada penambahan jumlah RTS penerima Raskin berdasarkan kesepakatan ditingkt nagari.

13. Program Advokasi Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum

Permasalahan :

- Adanya persoalan dalam hal pengalihan hak oleh Camat selaku PPAT dalam perbuatan hukum jual beli, hibah dan lain sebagainya sehingga terjadi persoalan hukum yang berakhir pada lembaga peradilan.
- Permasalahan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah terhadap tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.
- Permasalahan Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan izin sebagainya.

14. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

a. Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman (PPSP)

Permasalahan :

- Belum optimalnya sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan. Hal ini mengakibatkan dokumen perencanaan hanya bersifat statis yang kurang optimal dalam mengawal dan mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

15. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

Permasalahan :

- Masih belum aktifnya sekretariat UKS kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada pada tiap jenjang pendidikan .
- Pembangunan lokal baru **tidak diiringi** dengan pembangunan toilet dan tempat cuci tangan baru
- Para pengambil kebijakan kurang respon terhadap kegiatan UKS ini.

16. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media

a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Permasalahan :

- Belum terdistribusinya koran ke Nagari-nagari secara merata
- Banyaknya media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers
- Banyak wartawan yang belum memiliki kompetensi dari organisasi profesi dari organisasi profesi

b. Kegiatan Publikasi dan Promosi Daerah

Permasalahan :

- Terlalu banyak media yang bekerja untuk mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah
- Publikasi di Media Sosial Terkait Kegiatan Pemerintah Daerah Yang Masih menggunakan Perangkat Pribadi

c. Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah

Permasalahan :

- Masih menggunakan media Konvensional/ pajangan
- Proses penyimpanan Foto dan Video yang terbatas

17. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa

a. Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan, Peralatan dan Operasional Komunikasi (SANTEL)

Permasalahan :

- SANTEL sudah dibawah kewenangan OPD Kominfo.

18. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

a. Kegiatan Bimtek Aplikasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Permasalahan :

- Kurang tersedianya data yang akurat untuk dientrikan kedalam aplikasi Laporan Kinerja, sehingga aparatur tidak dapat melengkapi aplikasi tersebut
- Kurangnya pemahaman aparatur dalam menyusun suatu laporan perencanaan, sehingga Laporan Kinerja tidak sinkron terhadap Laporan Perencanaan
- Sering terjadinya pergantian personil yang menangani pelaporan, sehingga harus mempelajari kembali dari dasar penyusunan laporan
- Tidak tersedianya jaringan internet yang mendukung sinyal aplikasi SAKIP, sehingga kegiatan sering tertunda dan lambat.

b. Kegiatan Penilaian Kinerja SKPD

Permasalahan :

- Kurangnya respon SKPD dalam memenuhi permintaan data untuk Penilaian Kinerja SKPD
- Sering tidak tepat waktu penyampaian data penilaian kinerja SKPD

19. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda

a. Kegiatan Bimtek dan Penyusunan Standar Pelayanan

Permasalahan :

- Belum terlihat implementasi pelayanan sesuai standar yang disusun atau masih berupa dokumen

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

Permasalahan :

- Laporan yang disampaikan tidak didukung oleh data-data yang memadai
- Penyampaian Laporan tidak tepat waktu

c. Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang SOTK

Permasalahan :

- Singkatnya waktu penyelesaian OPD baru setelah keluarnya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga baik Perda maupun Perbup yang disusun terkesan tergesa-gesa dan kurang matang dalam merumuskannya

20. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Permasalahan :

- Masih terdapat aparatur yang diikutkan untuk pelatihan/pendidikan tidak sesuai dengan latar belakang ilmu/tupoksi, sehingga ilmu yang didapatkannya tidak dapat langsung diimplementasikannya terhadap pekerjaan yang dilakukan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

A. TUJUAN

Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, peningkatan pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan tersebut meliputi :

1. Penataan Organisasi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah yang Akuntabel
3. Meningkatkan Akuntabilitas pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan kewilayahan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Melahirkan dan Melaksanakan aturan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
6. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan, pembinaan keagamaan dan kebudayaan
7. Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan lingkungan yang kondusif

B. SASARAN

Sasaran dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan totalitas dari sasaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka merevitalisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan diterapkannya standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi yang baik

2. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melahirkan laporan keuangan yang handal, akuntabel yang berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pada Umumnya
3. Meningkatnya pelayanan, pengawasan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dengan meningkatnya kompetensi penyelenggara pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai tingkat nagari
5. Tersedianya aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan
6. Meningkatnya pembinaan keagamaan, adat dan budaya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pelatihan, sosialisasi, kunjungan kerja dan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang keagamaan, adat, dan budaya.
7. Meningkatnya stabilitas daerah yang bebas dari peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang dikalangan Aparatur Pemerintah, pelajar, dan masyarakat pada umumnya

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja (renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta rencana tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan Bappeda tahun 2018 serta Prakiraan Maju Rencana tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESIIR SELATAN

KODE		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		PENANGGUNG JAWAB
PR OG	KEG			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
		Urusan Wajib Pemerintahan Umum									
1		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.183.175.000			6.348.000.000		
	1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat Sekretariat Daerah	Pessel	100%	195.000.000	APBD	100%	235.000.000	Bagian Umum	
	2	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, Listrik, Telepon dan Air Setda	Pessel	100%	923.225.000	APBD	100%	1.200.000.000	Bagian Umum	
	3	Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah	Pessel	100%	238.000.000	APBD	100%	338.000.000	Bagian Umum	
	4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan SKPD Sekretariat Daerah	Pessel	100%	350.000.000	APBD	100%	450.000.000	Bagian Keuangan	
	5	Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan Lingkungan Kantor Bupati Pesisir Selatan	Pessel	100%	365.000.000	APBD	100%	465.000.000	Bagian Umum	
	6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Pessel	100%	96.950.000	APBD	100%	160.000.000	Bagian Umum	
	7	Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya jaringan dan komponen listrik kantor	Pessel	100%	70.000.000	APBD	100%	105.000.000	Bagian Umum	
	8	Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pessel	100%	75.000.000	APBD	100%	105.000.000	Bagian Umum	
	9	Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu daerah	Pessel	100%	1.720.000.000	APBD	100%	1.820.000.000	Bagian Umum	
	10	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pessel	100%	725.000.000	APBD	100%	930.000.000	Bagian Umum	
	11	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pessel	100%	75.000.000	APBD	100%	90.000.000	Bagian Umum	
	12	Kegiatan : Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah	Pessel	8 dok	150.000.000	APBD	100%	200.000.000	Bagian Keuangan	
	13	Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan pada SKPD Sekretariat Daerah	Pessel	6 dok	200.000.000	APBD	100%	250.000.000	Bagian Keuangan	
2		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan			3.935.000.000			4.605.000.000		
	1	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Pessel	100%	135.000.000	APBD	100%	145.000.000	Bagian Umum	

2	Kegiatan : Pengadaan Meubileur	Tersedianya Meubiler	Pessel	100%	175.000.000	APBD	100%	200.000.000	Bagian Umum
3	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Pessel	100%	520.000.000	APBD	100%	620.000.000	Bagian Umum
4	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pessel	100%	715.000.000	APBD	100%	815.000.000	Bagian Umum
5	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pessel	100%	880.000.000	APBD	100%	980.000.000	Bagian Umum
6	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubileur	Pessel	100%	25.000.000	APBD	100%	35.000.000	Bagian Umum
7	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pessel	100%	725.000.000	APBD	100%	925.000.000	Bagian Umum
8	Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	Tersedianya Kendaraan Roda 4 (empat)	Pessel	1	475.000.000	APBD	100%	575.000.000	Bagian Umum
9	Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Tersedianya Kendaraan Roda 2 (dua)	Pessel	1	135.000.000	APBD	100%	150.000.000	Bagian Umum
10	Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Pessel	100%	150.000.000	APBD	100%	160.000.000	Bagian Umum
3	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur Sekretariat Daerah			280.000.000			390.000.000	
1	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat/bimtek	Pessel	100%	150.000.000	APBD	100%	250.000.000	Bagian Organisasi
	Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Camat	Meningkatnya Motivasi Camat dalam melaksanakan tugas	Pessel	100%	130.000.000	APBD	100%	140.000.000	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan			240.874.300			300.000.000	
1	Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya Pembinaan UKS untuk Penilaian Tingkat Propinsi	Pessel	100%	150.000.000	APBD	100%	175.000.000	Bagian Kesra
2	Kegiatan : Standarisasi MDTA, TPQ/TPSQ	Terlaksananya peningkatan kemampuan guru pengajar TPA/TPSA	Pessel	100%	90.874.300	APBD	100%	125.000.000	Bagian Kesra
5	Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			450.000.000			465.000.000	
1	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab.Pessel	Meningkatnya kualitas koordinasi dengan instansi terkait untuk mengawasi Ormas dan Aliran Kepercayaan di Kab.Pessel	Pessel	100%	100.000.000	APBD	100%	115.000.000	Bagian Kesbangpol
2	Kegiatan : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya upaya pencegahan konflik sosial	Pessel	100%	250.000.000	APBD	100%	250.000.000	Bagian Kesbangpol
3	Kegiatan : Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian	Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi izin penelitian	Pessel	100%	100.000.000	APBD	100%	100.000.000	Bagian Kesbangpol
6	Program : Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			1.400.000.000			1.400.000.000	
1	Kegiatan : Komunitas Intelligen Daerah	Terlaksananya Komunikasi dan Koordinasi Intelijen Daerah	Pessel	100%	950.000.000	APBD	100%	950.000.000	Bagian Kesbangpol

	2	Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pessel	100%	300.000.000	APBD		100%	300.000.000	Bagian Kesbangpol
	3	Kegiatan : Tim Gabungan Pengendalian dan Penanganan Gangguan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terhimpunya informasi terhadap aktifitas/kegiatan perorangan yang terindikasi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pessel	100%	150.000.000	APBD		100%	150.000.000	Bagian Kesbangpol
	7	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan			795.000.000				865.000.000	
	1	Kegiatan : Pelaporan RANHAM		Pessel	100%	95.000.000	APBD		100%	100.000.000	Bagian Hukum
	2	Kegiatan : Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Pencegahan pungutan liar di Kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	100%	300.000.000	APBD		100%	300.000.000	Bagian Kesbangpol
	3	Kegiatan : Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Terfasilitasinya Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Nasional baik ditingkat Kabupaten maupun kecamatan	Pessel	100%	200.000.000	APBD		100%	215.000.000	Bagian Kesbangpol
	4	Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya kesadaran siswa, ASN dan masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela Negara	Pessel	100%	200.000.000	APBD		100%	250.000.000	Bagian Kesbangpol
	8	Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban			935.000.000				1.045.000.000	
	1	Kegiatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya Forum Kewaspadaan dini masyarakat	Pessel	100%	300.000.000	APBD		100%	300.000.000	Bagian Kesbangpol
	2	Kegiatan : Pemantauan Kegiatan Orang Asing	Terlaksananya koordinasi dalam pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan atau aktivitas di Kab.Pesisir Selatan	Pessel	100%	150.000.000	APBD		100%	150.000.000	Bagian Kesbangpol
	3	Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat tentang Empat Konsesus Nasional (Empat Pilar) Tingkat SLTA Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran Siswa tentang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Pessel	100%	75.000.000	APBD		100%	115.000.000	Bagian Kesbangpol
	4	Kegiatan : Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya Pembaruan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai jenis Ras, Suku dan Etnis di Kabupaten Pesisir Selatan.	Pessel	100%	135.000.000	APBD		100%	155.000.000	Bagian Kesbangpol
	5	Kegiatan : Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK)	Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan bagi organisasi politik, Ormas, ASN, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	100%	125.000.000	APBD		100%	145.000.000	Bagian Kesbangpol
	6	Kegiatan : Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Pessel	100%	150.000.000	APBD		100%	180.000.000	Bagian Kesbangpol
	9	Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terlaksananya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			893.000.000				895.000.000	
	1	Kegiatan : Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Terfasilitasinya upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika	Pessel	100%	893.000.000	APBD		100%	895.000.000	Bagian Kesbangpol

10		Program : Pendidikan dan Politik Masyarakat	Terlaksananya pendidikan politik masyarakat			700.000.000			725.000.000	
	1	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Ormas/LSM	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang ormas dan LSM	Pessel	100%	150.000.000	APBD	100%	150.000.000	Bagian Kesbangpol
	2	Kegiatan : Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Politik	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan ASN tentang peraturan bidang politik	Pessel	100%	200.000.000	APBD	100%	200.000.000	Bagian Kesbangpol
	3	Kegiatan : Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Keuangan Parpol	Adanya pemahaman terkait tertib administrasi pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang diberikan	Pessel	100%	100.000.000	APBD	100%	100.000.000	Bagian Kesbangpol
	4	Kegiatan : Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol (Tim Peneliti) dan Pemeriksaan Adm, Pengajuan bantuan keuangan parpol	Terkelolanya Bantuan Keuangan Parpol (Tim Peneliti) dan Pemeriksaan Adm, Pengajuan bantuan keuangan parpol	Pessel	100%	75.000.000	APBD	100%	100.000.000	Bagian Kesbangpol
	5	Kegiatan : Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Tersedianya dokumen sebagai bahan kebijakan pengambilan keputusan oleh pimpinan	Pessel	100%	175.000.000	APBD	100%	175.000.000	Bagian Kesbangpol
11		Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penguatan Perekonomian Masyarakat			255.000.000			450.000.000	
	1	Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Kebijakan Pemberasan (Raskin)	Terlayani dan Tercapainya kesejahteraan Sosial pada Kepala Keluarga yg kurang mampu	Pessel	24.298	150.000.000	APBD	100%	175.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
	2	Kegiatan : Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Terlaksananya Monitoring pada kios yang menerima penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	Pessel	95	15.000.000	APBD	100%	175.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
	3	Kegiatan : Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan LPJ 3 Kg	Terlaksananya Monitoring pada pangkalan yang menjadi penyalur LPJ 3 Kg	Pessel	90	90.000.000	APBD	100%	100.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
12		Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			2.620.000.000			3.152.500.000	
	1	Kegiatan : Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah Kab.Pesisir Selatan	Terlaksananya safari jumat, safari ramadhan, jumat membangun	Pessel	100%	550.000.000	APBD	100%	650.000.000	Bagian Kesra
	2	Kegiatan : Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ	Terikutinya MTQ oleh Kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	50 kafilah	750.000.000	APBD	100%	1.000.000.000	Bagian Kesra
	3	Kegiatan : Fasilitasi Jemaah Haji	Terfasilitasinya pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji	Pessel	100%	200.000.000	APBD	100%	200.000.000	Bagian Kesra
	4	Kegiatan : Lembaga Didikan Subuh	Terlaksananya Didikan Subuh	Pessel	100%	85.000.000	APBD	100%	90.000.000	Bagian Kesra
	5	Kegiatan : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Terpeliharanya nilai-nilai budaya Minang Kabau	Pessel	100%	250.000.000	APBD	100%	275.000.000	Bagian Kesra
	6	Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi Kemasayarakatan dan Keagamaan	Pessel	100%	275.000.000	APBD	100%	300.000.000	Bagian Kesra
	7	Kegiatan : Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan social	Terkelolanya administrasi pemberian hibah dan bantuan social	Pessel	100%	35.000.000	APBD	100%	37.500.000	Bagian Kesra
	8	Kegiatan : Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Pengkaderan terhadap anak-anak usia sekolah dalam bidang seni al quran	Pessel	100%	225.000.000	APBD	100%	275.000.000	Bagian Kesra

	9	Kegiatan : Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Generasi Muda	Terlaksananya pembinaan keagamaan sosial dan generasi muda	Pessel	100%	100.000.000	APBD		100%	125.000.000	Bagian Kesra
	10	Kegiatan : Pembinaan BKMT	terlaksananya Pembinaan BKMT	Pessel	100%	150.000.000	APBD		100%	200.000.000	Bagian Kesra
13		Program : Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Mass Media			2.200.000.000				2.850.000.000	
	1	Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Pessel	100%	950.000.000	APBD		100%	1.150.000.000	Bagian Humas dan Protokoler
	2	Kegiatan : Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (PEMDA)	Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda)	Pessel	100%	250.000.000	APBD		100%	350.000.000	Bagian Humas dan Protokoler
	3	Kegiatan : Publikasi dan Promosi Daerah	Terlaksananya Publikasi dan Promosi Daerah	Pessel	100%	1.000.000.000	APBD		100%	1.350.000.000	Bagian Humas dan Protokoler
14		Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peranan Pemuda dalam Bela Negara			55.000.000				65.000.000	
	1	Kegiatan : Peningkatan Hasil Karya Pemuda Pelopor	Terseleksinya wakil pesisir selatan untuk penilaian pemuda pelopor	Pessel	100%	55.000.000	APBD		100%	65.000.000	Bagian Kesra
15		Program : Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksananya Olahraga untuk ASN			22.985.000				35.000.000	
	1	Kegiatan : Pemasarakatan Olahraga Aparatur	Terlaksananya Olahraga Senam 2 mingguan bagi Aparatur	Pessel	24 kali	22.985.000	APBD		100%	35.000.000	Bagian Kesra
16		Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terkelolanya Arsip Daerah Kab.Pesisir Selatan			195.000.000				210.000.000	
	1	Kegiatan : Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Setda Secara Elektronik	Tersedianya informasi dan layanan yang cepat, tepat dan akurat bagi pimpinan	Pessel	57	195.000.000	APBD		100%	210.000.000	Bagian Umum
17		Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah			993.500.077				1.252.850.085	
	1	Kegiatan : Bintek Kapasitas Kewartawanan dan Pers/Studi Banding	Terbukanya wawasan jurnalistik wartawan yang bertugas di kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	100%	350.000.000	APBD		100%	450.000.000	Bagian Humas dan Protokoler
	2	Kegiatan : Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan	Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan	Pessel	100%	250.000.000	APBD		100%	350.000.000	Bagian Humas dan Protokoler
	3	Kegiatan : Bintek Keprotokolan Aparatur OPD dan Kecamatan	Terlatihnya aparat OPD dan Kecamatan terkait tata cara upacara, tata cara tempat duduk dan tata cara tamu	Pessel	100%	300.000.000	APBD		100%	350.000.000	Bagian Humas dan Protokoler
	4	Kegiatan : Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah	Pessel	100%	93.500.077	APBD		4 rapat	102.850.085	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
18		Program : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersedianya Sistem Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang Baik			1.401.535.514				1.575.189.065	
	1	Kegiatan : Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ	Terlaksananya Pelaksanaan lelang yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan	Pessel	100%	295.000.000	APBD		100%	300.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

	2	Kegiatan : Penyelesaian Sanggah dan Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa	Teradministrasi materi sanggah dan penyelesaiannya	Pessel	100%	100.000.000	APBD	100%	75.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	3	Kegiatan : Rapat Koordinasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dengan Instansi terkait tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Pessel	100%	80.000.000	APBD	100%	100.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4	Kegiatan : Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Tersusunnya Standar Dokumen Pengadaan Konstruksi	Pessel	100%	150.000.000	APBD	100%	200.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	5	Kegiatan : Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pessel	100%	100.000.000	APBD	100%	150.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	6	Kegiatan : Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Konsultasi / Pelatihan Pengadaan barang dan jasa	Pessel	100%	200.000.000	APBD	100%	230.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	7	Kegiatan : Pengembangan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	Pessel	100%	240.000.000	APBD	100%	260.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	8	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi, Tersusunnya dan tersusunnya Ranperda Izin Jasa Konstruksi	Pessel	2 dokumen	55.000.000	APBD	2 dok	60.500.000	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
	9	Kegiatan : Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Ekeltronik	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Pessel	100%	181.535.514	APBD	100%	199.689.065	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terlaksananya Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman (PPSP)			69.289.568			76.218.524	
	1	Kegiatan : Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP)	Terlaksananya Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman (PPSP)	Pessel	100%	69.289.568	APBD	100%	76.218.524	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
20		Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Diikutinya Pameran Expo Pembangunan			650.000.000			725.000.000	
	1	Kegiatan : Pameran Apkasi dan Sumbar Expo	Diikutinya Pameran Apkasi International Trade and Investment Summit serta Sumbar Expo	Pessel	100%	400.000.000	APBD	100%	450.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
	2	Kegiatan : Koordinasi Peningkatan Perekonomian Pesisir Selatan	Terlaksananya koordinasi peningkatan perekonomian Pesisir Selatan	Pessel	100%	150.000.000	APBD	100%	175.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
	3	Kegiatan : Forum Peningkatan Ekonomi Daerah	Persentase Pembangunan Ekonomi Daerah	Pessel	100%	100.000.000	APBD	100%	100.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
21		Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				365.096.930			449.606.623	
	1	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Aset pada SKPD Sekretariat Daerah	Pessel	96	150.000.000	APBD	100%	200.000.000	Bagian Keuangan
	2	Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Terlaksananya penyusunan refisi buku harga satuan pokok kegiatan 2017 dan HSPK 2018	Pessel	100%	70.000.000	APBD	100%	90.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
	3	Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Bulanan Perkembangan kegiatan seluruh SKPD	Pessel	180 Buku	77.820.930	APBD	180 buku	85.603.023	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur

	4	Kegiatan : Penyusunan Prosedur Kegiatan	Tersedianya Buku Sisdur Perjalanan Dinas Tahun 2017	Pessel	150 Buku	67.276.000	APBD		150 buku	74.003.600	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
22		Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Manajemen SDM Aparatur			380.000.000				520.000.000	
	1	Kegiatan : Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi per UU	Pessel	100%	90.000.000	APBD		100%	100.000.000	Bagian Organisasi
	2	Kegiatan : Evaluasi Kelembagaan UPTD Dinas dan Badan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan UPTD Dinas dan Badan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	100%	100.000.000	APBD		100%	150.000.000	Bagian Organisasi
	3	Kegiatan : Evaluasi Disiplin Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Disiplin Aparatur	Pessel	100%	100.000.000	APBD		100%	150.000.000	Bagian Organisasi
	4	Kegiatan : Penyusunan Kode Etik Pegawai	terbitnya buku Kode Etik Pegawai	Pessel	100%	90.000.000	APBD		100%	120.000.000	Bagian Organisasi
23		Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur KDH			375.000.000				475.000.000	
	1	Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Pessel	100%	375.000.000	APBD		100%	475.000.000	Bagian Umum
24		Program : Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan			1.110.000.000				1.260.000.000	
	1	Kegiatan : Penyusunan Peraturan Bupati	Terciptanya Produk Hukum daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel	Pessel	30	260.000.000	APBD		100%	280.000.000	Bagian Hukum
	2	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang disusun	Pessel	10	270.000.000	APBD		100%	290.000.000	Bagian Hukum
	3	Kegiatan : Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDH Hukum	Jumlah Buku SJDH yang disusun	Pessel	500	130.000.000	APBD		100%	150.000.000	Bagian Hukum
	4	Kegiatan : Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pemerintah Nagari	Jumlah Keputusan Bupati dan Produk Hukum Nagari yang dievaluasi	Pessel	570	250.000.000	APBD		100%	290.000.000	Bagian Hukum
	5	Kegiatan : Bimbingan Teknis Legal Drafting Produk Hukum Nagari	Terlaksananya Bimtek Legal Drafting Produk Hukum Nagari	Pessel	100	200.000.000	APBD		100%	250.000.000	Bagian Hukum
25		Program : Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda			1.301.577.373				1.803.735.110	
	1	Kegiatan : Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial	Ranperbud tentang Standar Kompetensi Manajerial	Pessel	100%	50.000.000	APBD		0%	100.000.000	Bagian Organisasi
	2	Kegiatan : Evaluasi Jabatan SKPD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	Pessel	100%	150.000.000	APBD		0%	200.000.000	Bagian Organisasi
	3	Kegiatan : Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Kab.Pesisir Selatan	Pessel	100%	71.577.373	APBD		100%	78.735.110	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
	4	Kegiatan : Penyusunan Peraturan Daerah tentang OPD dan Perbup tentang jabatan	Adanya Perda dan Perbup tentang jabatan structural	Pessel	100%	90.000.000	APBD		100%	150.000.000	Bagian Organisasi

		struktural								
5	Kegiatan :	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja SKPD	Terealisasinya grade beban kerja	Pessel	1	100.000.000	APBD	100%	150.000.000	Bagian Organisasi
6	Kegiatan :	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Tersedianya Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Pessel	1	150.000.000	APBD	100%	200.000.000	Bagian Organisasi
7	Kegiatan :	Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Terlaksananya Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Pessel	100%	100.000.000	APBD	100%	150.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
8	Kegiatan :	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik OPD Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik OPD Kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	1	150.000.000	APBD	100%	200.000.000	Bagian Organisasi
9	Kegiatan :	Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap OPD Lingkup Pemdakab Pesisir Selatan	Pessel	1	125.000.000	APBD	100%	150.000.000	Bagian Organisasi
10	Kegiatan :	Penyusunan Perbup Pelayanan Publik	tersusunnya Perbup Pelayanan Publik	Pessel	1	90.000.000	APBD	100%	100.000.000	Bagian Organisasi
11	Kegiatan :	Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemda Kabupaten Pesisir Selatan	Tersusunnya SOP pada setiap OPD	Pessel	1	125.000.000	APBD	100%	175.000.000	Bagian Organisasi
12	Kegiatan :	Bimtek dan Pembinaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terlaksananya Bimtek dan Pembinaan Lap.Kinerja SKPD	Pessel	43	100.000.000	APBD	0%	150.000.000	Bagian Organisasi
26	Program :	Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH	Terpenuhinya pelayanan administrasi daerah			2.455.500.000			2.680.000.000	
1	Kegiatan :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Rumah dinas KDH	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas KDH	Pessel	100%	91.500.000	APBD	100%	105.000.000	Bagian Umum
2	Kegiatan :	Penyediaan peralatan rumah tangga(KDH)	Tersedianya peralatan rumah tangga KDH	Pessel	100%	614.000.000	APBD	100%	725.000.000	Bagian Umum
3	Kegiatan :	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (KDH)	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH	Pessel	100%	1.750.000.000	APBD	100%	1.850.000.000	Bagian Umum
27	Program :	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (KDH)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepala Daerah			2.465.000.000			2.805.000.000	
1	Kegiatan :	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)	Tersedianya Peralatan rumah jabatan/dinas KDH	Pessel	100%	650.000.000	APBD	100%	750.000.000	Bagian Umum
2	Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)	Terpeliharanya Rumah Jabatan/Dinas (KDH)	Pessel	100%	875.000.000	APBD	100%	1.115.000.000	Bagian Umum
3	Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (KDH)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (KDH)	Pessel	100%	520.000.000	APBD	100%	520.000.000	Bagian Umum
4	Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas KDH	Pessel	100%	175.000.000	APBD	100%	175.000.000	Bagian Umum
5	Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (KDH)	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH)	Pessel	100%	245.000.000	APBD	100%	245.000.000	Bagian Umum
28	Program :	Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH)	Meningkatnya disiplin aparatur kepala daerah			170.000.000			195.000.000	

	1	Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH)	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan KDH	Pessel	100%	170.000.000	APBD		100%	195.000.000	Bagian Umum
29		Program : Advokasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah			350.000.000				375.000.000	
	1	Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Hukum	Terselesaikannya sengketa hukum pemerintah daerah	Pessel	6	350.000.000	APBD		6	375.000.000	Bagian Hukum
30		Program : Pemantapan Otonomi Daerah	Terlaksananya pemantapan otonomi daerah			1.170.000.000				1.390.000.000	
	1	Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penegasan batas daerah dan kecamatan di Kab.Pesisir Selatan	Pessel	100%	210.000.000	APBD		100%	300.000.000	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	2	Kegiatan : Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Terjalinnnya koordinasi antara Pemda dengan anggota Forkopimda	Pessel	100%	180.000.000	APBD		100%	200.000.000	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	3	Kegiatan : Penyusunan LPPD	Tersusunnya Buku LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016	Pessel	100%	85.000.000	APBD		100%	90.000.000	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4	Kegiatan : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dengan SKPD dan Stakeholder	Pessel	100%	600.000.000	APBD		100%	700.000.000	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	5	Kegiatan : Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Buatan	Terinventarisasinya rupa bumi di Kab.Pessel	Pessel	100%	95.000.000	APBD		100%	100.000.000	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
31		Program : Peningkatan IMTAQ Bagi Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur			225.000.000				250.000.000	
	1	Kegiatan : Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan hari besar Islam	Terlaksananya ceramah dalam rangka peningkatan IMTAQ Aparatur	Pessel	100%	225.000.000	APBD	-	100%	250.000.000	Bagian Kesra
32		Program : Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Peningkatan kinerja SKPD Nilai AKIP Kabupaten			445.000.000				475.000.000	
	1	Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	1	150.000.000	APBD		100%	200.000.000	Bagian Organisasi
	2	Kegiatan : Penyusunan Perbup tentang SAKIP	Tersedianya Perbup SAKIP	Pessel	1	90.000.000	APBD		100%	100.000.000	Bagian Organisasi
	3	Kegiatan : Monev Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD	Pessel	100%	80.000.000	APBD		100%		Bagian Organisasi
	4	Kegiatan : Penyusunan perjanjian kinerja OPD	Tersusunnya kinerja OPD Kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	100%	125.000.000	APBD		100%	175.000.000	Bagian Organisasi
33		Program : Pembangan Manajemen Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik			350.000.000				450.000.000	
	1	Kegiatan : Bimbingan Teknis Standar Pelayanan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Standar Pelayanan	Pessel	100%	150.000.000	APBD		100%	200.000.000	Bagian Organisasi

	2	Kegiatan : Inovasi Pelayanan Publik	Terlaksananya inovasi pelayanan public	Pessel	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000	Bagian Organisasi
	3	Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya daftar urut kepangkatan, bezzeting, kenaikan gaji berkala dll	Pessel	1	100.000.000	APBD		0%	150.000.000	Bagian Organisasi
34		Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya optimalisasi sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100.000.000				125.000.000	
	1	Kegiatan : Penunjang Operasional Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan perbendaharaan Sekretariat Daerah	Pessel	100%	100.000.000	APBD		100%	125.000.000	Bagian Keuangan
35		Program : Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			200.000.000				200.000.000	
	1	Kegiatan : Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan	Terwujudnya penegasan batas daerah dan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
36		Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terkelolanya Arsip Daerah Kab.Pesisir Selatan			435.000.000				470.000.000	
		Kegiatan : Optimalisasi Sistem Informasi Ketatausahaan	Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan dan Sekretariat daerah	Pessel	100%	125.000.000	APBD		100%	140.000.000	Bagian Umum
		Kegiatan : Peningkatan Nilai-Nilai Historis Daerah	Terselenggaranya Event Hari jadi Kabupaten Pesisir Selatan	Pessel	100%	310.000.000	APBD		100%	330.000.000	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
37		Program: Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Terpenuhinya kebutuhan data/informasi			325.000.000				400.000.000	
		Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi PLTMH dan PLTS	Termonitornya PLTMH dan PLTS di Kab. Pesisir Selatan	Pessel	100%	125.000.000	APBD		100%	150.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
		Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Produksi Hasil Hutan	Terlaksananya Pembinaan terhadap IUIPHHK dan tersedianya data produksi dan konsumsi kayu di Kab. Pesisir selatan	Pessel	100%	200.000.000	APBD		100%	250.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
		JUMLAH				35.496.533.762				41.753.099.407	

BAB IV

PENUTUP

Di dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di Bagian – Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen Rencana Kerja 2018 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2018 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PESISIR SELATAN**



(Ir. ERIZON, MT)
NIP. 19630323 199003 1 005